

Dinamika Sosial Ekonomi Nelayan Kampung Wuring di Pesisir Utara Flores

Martin Elvanyus De Porres*

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi:
email : elvanporres@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas kontestasi perebutan sumber daya di kalangan nelayan Kampung Wuring, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan menjelaskan bagaimana terjadinya resistensi yang dilakukan oleh para nelayan kecil kepada nelayan yang menguasai sarana produksi penangkapan ikan. Studi ini menggunakan metode penelitian data kualitatif melalui partisipasi observasi dan penyelidikan literatur terkait topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Wuring mulanya merupakan tempat persinggahan pelaut Suku Bajo sejak abad ke-17, yang semakin masif terjadi dengan migrasi suku-suku lain, dan secara administratif diperkenankan menjadi perkampungan pada masa pemerintahan feodal Raja Don Thomas Ximenes da Silva. Introduksi alat tangkap modern pada era Orde Baru menyebabkan terjadinya konsentrasi kepemilikan sarana produksi yang kemudian selanjutnya memunculkan relasi patron-klien, masalah hutang, hingga anak putus sekolah. Adapun resistensi yang muncul dari para nelayan miskin tampak dalam mabuk-mabukkan, tawuran, hingga usaha melakukan mobilitas sosial naik dengan ikut serta menjadi tukang kampanye dalam perhelatan pemilihan legislatif dan kepala daerah tempatan. Dengan demikian, dinamika sosial ekonomi di Wuring memiliki akar sejarah yang panjang dan tidak terlepas dari fakta kepengaturan dari luar yang kemudian berimbas ke dalam kehidupan warga tempatan.

Kata kunci: Nelayan, Suku Bajo, Wuring, sosial ekonomi, resistensi

PENDAHULUAN

Hanjani, seorang nelayan kecil di perkampungan Wuring, pesisir utara Flores, sedang duduk di beranda rumah apungnya di area kiri tanjung pemukiman bekas hamparan pasir putih dan jejalan pohon bakau. Hanjani tidak pergi melaut dan sementara berseloroh dia merapikan senar pancingnya. “Motor rusak, jadi saya tidak turun melaut” katanya, “hanya anak-anak saya yang pergi.” Sudah dua hari dia memang tidak beraktivitas sebagaimana nelayan biasanya. Perahunya macet dan mesin harus diperbaiki. Dia memang masih punya satu *body* perahu lain tetapi tidak punya mesin sehingga dibiarkan begitu saja; terikat di antara tiang-tiang penyangga jembatan bambu. Saat musim angin barat tiang-tiang beserta alas rumah apung tersebut seringkali goyang tak keruan akibat ombak yang terpantul balik dari tembok tambatan perahu Wuring. “Bulan Januari cuaca lagi buruk, semoga anak-anak selamat, semoga kami semua baik-baik saja,” ujarnya lebih lanjut. Dua orang anaknya bekerja mengikuti kapal nelayan lain, biasanya mereka melaut bersama ayahnya.

Ketika tengah berbincang dengan Hanjani pada pertengahan minggu pertama Januari tahun 2020, saya kemudian bertemu dengan Arman, seorang kawan Hanjani. Arman tidak memiliki perahu meski mengaku diri sebagai nelayan dan di Kampung

Wuring dia dikenal sebagai penjaga keamanan kampung, atau lebih tepatnya preman kampung. Dia seringkali ikut bekerja dengan kapal nelayan besar sebagaimana yang dilakukan anak-anak Hanjani dan sejumlah pemuda lain yang tidak memiliki sampan atau perahu. “Maunya punya kapal sendiri, biar bisa jadi bos,” kata Arman di tengah-tengah perbincangan kami. Rumah dia letaknya tidak jauh dari rumah Hanjani di bagian Wuring Toroh atau kampung ujung yang berhadapan langsung dengan laut Flores. Kebanyakan rumah-rumah yang terletak di Wuring Toroh dihuni oleh para nelayan kecil dan artisan, berbeda dengan kampung bagian tengah yang banyak terdapat rumah berbatu bata ataupun rumah panggung berpapan warna-warni dan sebagian besar pemiliknya punya *lempara*, kapal, atau perahu tiga empat biji.

Baik Arman maupun Hanjani, pada masa Pemilu ataupun Pemilukada, seringkali terlibat sebagai juru kampanye lapangan bagi sejumlah partai politik. Mereka bekerja fleksibel, tidak terikat pada partai atau calon anggota legislatif tertentu. *Siapa yang kasih uang, ya kami ambil*, begitu pungkas mereka. Politik klientisme ini memang lazim terjumpai di sejumlah negara demokrasi gelombang ketiga (Aspinall, 2014; Muhtadi, 2013). Di kampung, dalam sudut pandang kelompok sosial tertentu, usaha berkampanye dan terlibat dalam laku politik uang dianggap tidak bermoral atau pekerjaan orang malas. Namun, anggapan ini kalau ditelaah lebih jauh tentu memunculkan sejumlah pertanyaan untuk mengurai persoalan-persoalan kompleks dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian data kualitatif, melalui cara observasi lapangan dan studi literatur, yang bertujuan untuk memahami lebih dekat dinamika penguasaan sumber daya di kalangan nelayan di kampung Wuring, yang dapat terkategori juga sebagai wilayah sub-urban, dengan memeriksa kelindan relasi sosial, ekonomi, dan politik di dalam kehidupan internal kampung. Adapun paradigma besar mengenai kontestasi ruang sempit diuraikan oleh Henri Lefebvre melalui telaah-telaahnya atas produksi ruang urban, ataupun David Harvey yang berfokus pada teritorial atau area geografis tertentu, terutama dalam konteks ekonomi-politik neoliberalisme. Menurut Lefebvre (1991) definisi atau tatapan atas ruang tidak terlepas dari jaringan-jaringan relasi dan aktivitas sosial di dalam diri masyarakat tempatan. Sementara bagi Harvey (2010), ruang merupakan wilayah perebutan kapital untuk kepentingan akumulasi.

Konsep-konsep besar tersebut dioperasikan dalam tulisan ini lewat perspektif historis guna menjelaskan kehidupan sosial ekonomi nelayan Wuring yang mayoritasnya berketurunan Suku Bajo dan Bugis. Studi lapangan dilakukan selama kurang lebih sebulan dari awal Januari hingga pertengahan Februari 2020, terutama di Kampung Wuring Toroh atau kampung bagian ujung. Data-data yang dikumpulkan berupa wawancara semi-terstruktur dengan nelayan baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, pengamatan pada kegiatan sehari-hari, juga kajian literatur berhubungan dengan topik penelitian. Cara pengumpulan informasi ini menurut Fontana & Frey (1994) dimaksudkan untuk menggali dan memahami hubungan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat tempatan.

PEMBAHASAN

A. Dagang di Laut, Lalu Mukim di Darat

Pemukiman Wuring pesisir laut Flores, Kecamatan Alok Barat, terletak di sebelah barat Kota Maumere, ibukota Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jarak dari Maumere sekitar 2 kilometer sebelum berbelok ke utara di pertigaan menuju lokasi perkampungan. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, menyebabkan Wuring dikenal juga sebagai kampung nelayan. Pemukiman ini awalnya merupakan tempat persinggahan para pelaut Suku Bajau (Bajo) yang tersebar dari Semenanjung Malaya, Asia Tenggara, sejak abad ke-18 (Kazufumi, 2017). Persinggahan Suku Bajo di Wuring dan daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur sebagian besarnya merupakan lanjutan migrasi pelayaran dari wilayah Flores bagian barat juga Sulawesi (Fox, 2013; Gobang & Nugroho, 2017; Susar, 2003). Di Kabupaten Sikka sejumlah tempat persinggahan lainnya bisa dilacak di wilayah Waipare, sebelah timur Kota Maumere, ataupun di pulau kecil sekitar Flores, seperti Permaan dan Kojadoi. Daerah-daerah ini mulanya hanyalah tempat beristirahat dan memperbaiki kapal, tetapi kemudian berlanjut dengan kontak atau relasi sosial-ekonomi dengan penduduk daratan. Hubungan perdagangan tradisional itu menyebabkan para pelaut mulai membangun pemukiman sebagai penanda agar orang daratan tidak perlu repot-repot mencari tempat untuk bertransaksi; ubi dengan ikan, kayu perahu dengan teripang.

Komunitas Suku Bajo di Wuring pada awalnya berjumlah 17 kepala keluarga yang berasal dari Tou, Kota Baru, di Ende Utara dan dikepalai oleh seorang kepala kampung bernama Pijung Juma. Mereka menjalin hubungan baik dengan Raja Sikka Mo'ang Bako Kikir Hiwa (Berjari Sembilan) yang berkuasa sekitar akhir abad ke-19. Komunitas Suku Bajo di Wuring semakin mengalami perkembangan, terutama pada masa kekuasaan Raja Mo'ang Ratu Thomas Ximenes da Silva (1922-1954). Raja Thomas memperkenankan orang-orang Suku Bajo menetap di Kampung Wuring. Potensi Wuring sebagai pelabuhan perdagangan yang ramai menjadikan tempat ini sebagai gerbang masuk dan terjadinya asimilasi berbagai budaya, bersebelahan dengan Kampung Bebeng yang merupakan salah satu pelabuhan tertua di wilayah pantai utara Flores (Lewis, 2010). Nelayan yang kemudian singgah dan menetap di Wuring berasal dari Sumbawa, Selayar, Buton, dan Bugis. Migrasi selanjutnya, berdasarkan cerita warga tempatan, beriringan dengan peristiwa pemberontakan Kahar Muzakkar dan DI/TII di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1950-an. Mereka yang tinggal di pesisir Sulawesi melarikan diri demi terhindar dari konflik.

Sekitar tahun 1980-an, Wuring kemudian kian diakui sebagai kampung atau bagian dalam sistem pemerintahan desa. Menurut Imam Zainuddin, seorang tokoh masyarakat, pada masa-masa itulah nama Wuring mulai dikenal secara resmi, seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Orang-orang Suku Laut harus didaratkan dan mesti memiliki tempat mukim, dalam artian tinggal di darat untuk lebih mudah dikontrol oleh aparatus negara. Di sejumlah tempat di pedalaman Indonesia, orang-orang yang dianggap terasing juga mesti mengalami "pembudayaan" untuk mendapatkan keragaman dalam konteks persatuan (Kahn, 2002). Mereka dipandang

sebagai orang yang liar, primitif, dan terbelakang sehingga negara harus memberadabkan mereka, termasuk menjadikannya sebagai objek pembangunan (Li, 1999).

Suku Bajo sendiri dianggap sebagai perompak dan kelompok sosial berkebudayaan rendah, terutama dengan pengidentifikasian fisik dan tingkat pendidikan menurut kacamata modernitas (Madlan et al., 2014). Tidak mengherankan, di Wuring efek dari ini terlihat pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda pulau Flores tahun 1992. Sejumlah penyintas Suku Bajo yang direlokasikan ke wilayah dataran tinggi malah memutuskan untuk kembali bangun pemukiman di tepi laut agar tetap bekerja memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Ini berbeda dengan para pedagang Bugis ataupun Makassar yang sejak masa pemerintahan Raja Don Thomas membeli tanah raja dan mengusahakan pertanian di sejumlah wilayah Maumere (Tolo, 2016). Di daerah Magepanda, misalnya, mereka kemudian menjadi tuan tanah/sawah baru yang mempekerjakan petani upahan dari Nita ataupun Lio.

B. Introduksi Alat Tangkap Modern

Proses “pemberadaban” yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap pelaut Suku Bajo ditandai juga dengan introduksi alat tangkap ikan modern demi efisiensi dan peningkatan hasil laut guna mendongkrak perekonomian negara. Di Wuring, berdasarkan cerita para nelayan, perkembangan ini terjadi sejak tahun 1970-an di mana sebelumnya sarana produksi mereka berupa peralatan tangkap tradisional, semisal perahu layar, sampan, pukot harimau, dan perangkap atau *bubu*. Pada waktu itu berlaku pula Surat Keputusan Menteri Pertanian No 607/1976 terkait pembagian zonasi penangkapan ikan demi menghindari konflik nelayan, namun tidak terbukti efektif sehingga pemerintah harus mengeluarkan Keputusan Presiden No 30/1980 yang melarang pengoperasian pukot harimau. Di Maumere dibangunlah pula pabrik pengalengan dan pengawetan ikan bernama PT Bali Raya. Kantong para nelayan lumayan tebal, ikan hasil tangkapan dipasok ke perusahaan (Leo, 2008). Ikan-ikan para nelayan Wuring juga dijual di depan rumah di atas *tedang-tedang* kecil (balai-balai) di pinggir jalan yang membelah perkampungan. Jumlah nelayan yang masih sedikit menyebabkan akses atas sumber daya laut memang senantiasa terbuka, meskipun pada waktu itu, tahun 1987, kawasan Teluk Maumere telah ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari kawasan Wisata Taman Laut. Tidak jarang, para nelayan yang masih menggunakan pukot harimau harus berhadapan dengan petugas Angkatan Laut.

Pada tahun 1992 fenomena alam gempa bumi dan tsunami melanda pulau Flores dan sekitarnya. Wuring menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah (Yeh et al., 1993). Nelayan yang selamat direlokasikan ke wilayah daratan sekitar seperti Hewuli dan Nangahure bukit. Namun, sebagaimana sempat disinggung di atas mereka akhirnya kembali menghuni di Wuring. Mama Solo Mbulo, salah seorang penyintas, sempat berpendapat, seandainya tulang ikan bisa tumbuh di darat, pasti mereka mau pindah (diungsikan). Pemerintah kemudian merenovasi pemukiman, dalam arti melakukan reklamasi, dan menyebabkan hunian Kampung Wuring kembali padat. Relasi kultural dan kekerabatan dengan anggota Suku Bajo dan Bugis lain di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat ataupun Adonara di Flores bagian timur menyebabkan terjadinya migrasi masuk

dari nelayan lainnya. Mereka yang datang kemudian biasanya merupakan pemilik alat tangkap yang lebih canggih.

Setelah PT Bali Raya porak poranda akibat dihantam gempa bumi dan tsunami, tidak ditemukan lagi data ataupun catatan tentang perusahaan pengalengan ikan besar yang beroperasi di Maumere. Lokasi reruntuhan perusahaan ini dijadikan para nelayan sebagai tempat labuh ikan untuk didistribusikan ke daratan yang dalam perkembangannya menjadi pasar ikan kecil. Lantas, demi kepentingan restrukturisasi pembangunan dan kemajuan masyarakat, para nelayan di Wuring kemudian diikutsertakan dalam organisasi-organisasi nelayan untuk mendapatkan pelatihan dan bantuan. Imbasnya, nelayan yang tidak memilik sarana produksi harus melakukan kredit pinjaman ke koperasi dan sebagiannya bekerja menjadi anak buah kapal atau pembantu armada tangkap besar. Ini juga disebabkan oleh makin jauhnya area keberadaan ikan usai peristiwa gempa dan tsunami. Nelayan Hanjani, misalnya, tahun 1980-an ketika masih belia dia bekerja mengikuti lempara nelayan lain tersebut ayahnya hanya punya sampan dayung, dan sekitar tahun 2000 baru bisa punya perahu motor sendiri.

Pada masa Otonomi Daerah jumlah alat tangkap di Wuring berkembang semakin banyak. Pelabuhan kapal barang kian diperlebar untuk akomodasi barang-barang kebutuhan konsumsi masyarakat Flores dan pengangkutan komoditi tempatan ke luar daerah. Tak pelak, sebagian perahu ataupun *lempara* turut diparkir di sekitar area pelabuhan, menyebabkan lokasi pelabuhan penuh sesak sehingga pemerintah harus membangun dermaga khusus untuk tambatan perahu. Bantuan dari pemerintah daerah, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan, menjadi salah satu faktor bertambahnya perahu, kapal dan peralatan tangkap lainnya. Faktor lainnya ialah perkembangan populasi penduduk karena migrasi masuk juga usaha dari para nelayan kecil untuk mengembangkan sarana produksi mereka sendiri. Namun, meski telah memiliki perahu bermesin tempel sendiri itu bukan berarti mereka telah mengalami peningkatan mobilitas sosial. Sebagian besar dari mereka justru terlilit hutang entah ke lembaga perbankan, koperasi kredit, ataupun koperasi harian dan rentenir (tengkulak) yang kebanyakan merupakan para nelayan besar. “Kami tidak punya jaringan untuk dapat bantuan. Kami bukan orang sekolah,” kata Amir, yang menggantungkan rezekinya di kapal milik salah seorang ketua RT setempat. Program-program bantuan dan pelayanan masyarakat memang lebih menguntungkan kelompok mampu dan elit dalam desa (Antlöv, 2002). Elit dan kelompok yang memiliki sarana produksi tersebut juga kerap kali terlibat sebagai penyumbang dana serentak memobilisasi suara kala pemilihan umum tiba, terutama dalam kontestasi politik lokal.

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses observasi pada penelitian ini, di Kampung Wuring, hampir setiap hari tampak pegawai koperasi menyusuri lorong jembatan bambu dan mengetuk pintu rumah warga untuk menagih hutang. Jika tuan rumah tidak ada atau pintu tidak dibukakan, besoknya para petugas itu datang kembali, dan jika tidak bertemu mereka biasa menitipkan pesan ke tetangga sekitar yang dibalas dengan anggukan atau lenguhan masam karena si tetangga juga terlilit situasi serupa. Kalaupun hendak meminjam ke bank, yaitu bank BRI yang berdiri tepat di depan jalan masuk perkampungan, para nelayan wajib menjadikan sertifikat tanah sebagai agunan.

Sertifikat tanah ini dipinjam dari penduduk lokal yang bukan nelayan atau warga Maumere yang mereka sebut sebagai orang gunung, dan pemberi pinjaman akan mendapatkan *fee* atau bonus sebesar Rp 1.000.000,- (Nurlaili, 2012). Rumah tangga yang berhutang mengalami kewalahan, karena selain membayar hutang di bank, bonus untuk pemberi pinjaman serta perhitungan subsistensi, hasil produksi tangkapan ikan harus dipasok untuk perusahaan-perusahaan ikan yang sebelumnya telah menyalurkan kredit bagi mereka. Pada tahun 2011, terdapat 19 pengusaha ikan berebut ikan di Sikka untuk diekspor ke luar daerah hingga ke luar negeri (*Pos Kupang*, 2011). Relasi kerja yang dibangun antara perusahaan dan nelayan mengikuti pola mitra, inti, dan plasma. Buruh nelayan ataupun anak buah kapal juga harus berbagi hasil tangkapan bersama buruh lainnya berdasarkan spesifikasi kerja dengan tuan kapal atau perahu mendapat porsi lebih banyak.

C. Tarung Geng Antargang

Di Kampung Wuring kerap kali terjadi juga pertengkaran ataupun perselisihan antarpemuda sebagai bagian dari geng yang mewakili gang tertentu. Menurut Irving Spergel (1990), geng merupakan *interstitial grup*, kelompok sosial di antara tahap anak dan orang tua yang di dalamnya berkelindan pula sejumlah masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Apa yang tergambarkan di Kampung Wuring mengungkap lebih jauh pandangan Spergel bahwasanya geng pemuda antargang itu bisa terpetakan dalam lanskap latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Kebanyakan pemuda Wuring Toroh berasal dari keluarga yang sebagian besarnya merupakan buruh nelayan, nelayan bersampan dayung dan mesin tempel, sementara Wuring Leko dan Tengah terdiri dari keluarga-keluarga pemilik kapal, bahkan tuan ternak seperti ayam dan kambing. Di Wuring Toroh terdapat banyak anak muda yang mengalami putus sekolah, yaitu hanya tamatan SD. Hal ini berbeda dengan di Wuring Leko dan Tengah yang mana ada yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana sebelum memutuskan jadi nelayan meneruskan usaha orang tua atau bekerja di sektor lain di luar kampung.

Konflik yang muncul di kalangan nelayan Wuring masa sekarang merupakan akumulasi dari diferensiasi penguasaan teknologi produksi sejak masa Orde Baru yang berakibat pada terbentuknya struktur ketimpangan sosial-ekonomi. Setelah Orde Baru tumbang, para nelayan lantas mendapatkan otonomi seluas-luasnya sehingga konflik pun nyaris tidak terhindarkan. Emmerson (1982), sebagaimana dikutip Yuwono (2002), mengatakan sengketa di kalangan nelayan pada dasarnya bukanlah resistensi terhadap modernisasi dalam hal ini teknologi penangkapan, tetapi pada tegaknya kode-kode keadilan. Situasi tersebut juga bisa dibaca sebagai bentuk resistensi mengikuti pandangan Scott (1990) yang tertampilkan secara simbolik lewat gosip ataupun perkataan-perkataan sebagai transkrip tersembunyi dalam upaya perlawanan kelas yang ter subordinasi.

Tidak ditemukan cerita tentang konflik atau perkelahian langsung antara para juragan kapal atau pemberi kredit dan nelayan kecil, tetapi sentimen antargang tersebut bisa menunjukkan situasi ketimpangan sosial ekonomi di kampung tersebut. Secara lebih luas, perlawanan tersembunyi ini yang diiringi hasrat melakukan mobilitas sosial naik, tertunjukkan juga dengan usaha ikut serta para nelayan di Wuring Toroh sebagai

juru kampanye saat masa musim pemilihan umum sebagaimana digambarkan di awal tulisan. Mereka tidak peduli calon anggota legislatif berasal dari kampung tersebut atau bukan, yang mereka dukung ialah siapa yang mau membantu meningkatkan kondisi perekonomian mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial ekonomi di Wuring memiliki akar sejarah yang panjang dan tidak terlepas dari fakta pengaruh dari luar yang kemudian berimbas ke dalam kehidupan warga setempat. Pengenalan sistem kebijakan negara modern dan penetrasi ekonomi pasar yang gencar menyebabkan para nelayan harus menghadapi sejumlah ketegangan di dalam internal kampung. Mulanya para nelayan Suku Bajo lewat di pesisir utara Flores untuk berdagang dan kemudian singgah, bertempat tinggal, serta menjalin relasi sosial dengan penduduk daratan sebelum akhirnya diperkenankan menetap secara resmi oleh pemerintahan feodal kerajaan Sikka bentukan negara kolonial Hindia Belanda.

Kontestasi perebutan sumber daya penangkapan ikan semakin terlihat kala diperkenalkannya sarana produksi modern oleh pemerintah Orde Baru yang merujuk pada pembentukan lapis-lapis kelas sosial ekonomi masyarakat. Para nelayan yang tidak mendapatkan akses terhadap teknologi penangkapan kemudian menjual tenaga kerjanya dan terjerembab ke dalam mekanisme perhutangan ataupun kredit baik ke perusahaan ikan ataupun para nelayan besar. Relasi patron-klien yang muncul menyebabkan pula terjadinya protes-protes sosial yang ditunjukkan secara simbolik oleh para nelayan kecil. Studi lebih lanjut dibutuhkan dari bidang kehidupan lain untuk memeriksa terjadinya dinamika perebutan sumber daya di kalangan para nelayan demi terciptanya situasi hidup yang adil dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H. (2002). *Negara Dalam Desa. Patronase kepemimpinan lokal*. Lappera Pustaka Utama.
- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570.
- Emmerson, D. K. (1982). Orders of meaning: understanding political change in a fishing community in Indonesia. In B. O. Anderson & A. Kahin (Eds.), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*. Cornell Modern Indonesian Project.
- Fontana, A., & Frey, J. H. (1994). Interviewing: The Arts of Science. In N. a. Y. L. Denzin (Ed.), *Handbook of Qualitative Research: Vol. I*. Sage Publications.
- Fox, J. J. (2013). Notes on the southern voyages and settlements of the Sama-Bajau. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 133(4), 459–465.
- Gobang, A. A. K. S., & Nugroho, A. M. (2017). *Perkembangan spasial hunian suku Bajo di Kampung Wuring Kota Maumere*. 167, 1–14.

- Harvey, D. (2010). *Imperialisme baru, genealogi dan logika kapitalisme kontemporer*. Resist Book.
- Kahn, J. S. (2002). Membudayakan daerah pedalaman Indonesia. In T. M. Li (Ed.), *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Yayasan Obor.
- Kazufumi, N. (2017). Maritime Diaspora and Creolization : Genealogy of the Sama-Bajau in Insular Southeast Asia. In K. Ikeya (Ed.), *Sedentarization among Nomadic Peoples in Asia and Africa*. National Museum of Ethnology.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Blackwell.
- Leo, N. (2008). Perikanan, Potensi Besar di Sikka. *Pos Kupang*, 1.
- Lewis, E. D. (2010). *The stranger-kings of Sikka*. KITLV Press.
- Li, T. M. (1999). Compromising power: Development, culture, and rule in Indonesia. *Cultural Anthropology*, 14(3), 295–322.
- Madlan, L. B., Seok, C. B., Mutang, J. A., Baharudin, S. A., & Joo, H. C. (2014). The Prejudice of Bajau: From Own and Others Ethnic Perspective: A Preliminary Study in Sabah. *International Journal of Information and Education Technology*, 4(3), 244–248.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>
- Nurlaili. (2012). Strategi Adaptasi Nelayan Bajo Menghadapi Perubahan Iklim: Studi Nelayan Bajo Di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 14(3), 599–624.
- Pos Kupang. (2011). *19 Pengusaha Rebut Ikan di Sikka*. <https://kupang.tribunnews.com/2011/07/27/19-pengusaha-rebut--ikan-di-sikka> diakses pada 23 November 2020
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Spergel, I. A. (1990). Youth Gangs: Continuity and Change. *Crime and Justice*, 12, 171–275. <https://doi.org/10.1086/449166>
- Susar, N. P. (2003). *Mengarung Samudera Bangsa*. Yayasan Flores Sejahtera.
- Tolo, E. Y. S. (2016). Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(2), 173–204.
- Yeh, H., Imamura, F., Synolakis, C., Tsuji, Y., Liu, P., & Shi, S. (1993). The Flores Island tsunamis. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 74(33), 369–373.
- Yuwono, P. S. H. (2002). Otonomi Daerah di Sektor Penangkapan Ikan. *Populasi*, 13(1), 32–34.